BADAN STANDARDISASI NASIONAL

RENCANA STRATEGIS

BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT, KERJA SAMA, DAN LAYANAN INFORMASI TAHUN 2020-2024

BADAN STANDARDISASI NASIONAL

RENCANA STRATEGIS

BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT, KERJA SAMA, DAN LAYANAN INFORMASI

TAHUN 2020-2024

JAKARTA
2020

Kata Pengantar

Rencana Strategis (Renstra) Biro Hubungan Masyarakat, Kerja Sama, Dan Layanan Informasi BSN Tahun 2020-2024 memuat misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan, target kinerja dan pendanaan yang merupakan acuan utama dalam penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh Biro Hubungan Masyarakat, Kerja Sama, Dan Layanan Informasi BSN dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mulai 2020 sampai dengan 2024 sebagai unit pendukung tercapainya kegiatan ketersediaan infrastruktur mutu nasional yang handal di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian di Indonesia.

Renstra ini disusun dengan mengacu pada visi, misi, tujuan, sasaran strategis BSN dan Sekretariat Utama BSN yang dijabarkan ke dalam kebijakan, program dan kegiatan yang sejalan dengan perkembangan penyelenggaraan standardisasi nasional, regional dan internasional. Dengan disusunnya Renstra ini, diharapkan akan mampu menjadi dokumen acuan dalam meningkatkan keterpaduan, keteraturan, dan keterkendalian perencanaan program dan kegiatan di lingkungan Kesestamaan BSN dalam rangka mencapai kinerja yang tinggi sebagaimana yang digariskan pada indikator kinerja dari masing-masing dan melaksanakan tugas dan fungsi Biro Hubungan Masyarakat, Kerja Sama, Dan Layanan Informasi BSN.

Jakarta, Maret 2021

Kepala Biro Hubungan Masyarakat,
Kerja Sama, Dan Layanan Informasi

Zul Amri

Daftar Isi

Halaman Judul..... i
Kata Pengantar..... ii
Daftar Isi..... iii
Daftar Tabel..... iv
Daftar Gambar..... v

BAB I PENDAHULUAN..... 6
1.1 Kondisi Umum …….. 7
1.2 Potensi dan Permasalahan..…… 22

BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN 2020-2024……..... 26
2.1 Visi BSN , Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Sekretariat Utama BSN…….. 26
2.2 Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Biro Hubungan Masyarakat, Kerja Sama, Dan Layanan Informasi …..……..... 28

BAB III KEGIATAN DAN RINCIAN OUTPUT..... 30
3.1 Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan IKSK Biro Hubungan Masyarakat, Kerja Sama, Dan Layanan Informasi .....……. 30
3.2 Rincian Output……...….. 32

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN..... 35
4.1 Target Kinerja…… 35
4.2 Kerangka Pendanaan….....……..……...….. 36

BAB V PENUTUP…….……..... 37

LAMPIRAN

Lampiran 1: Matrik Kinerja dan Pendanaan Program - Kegiatan

Lampiran 2: Matrik Kerangka Regulasi

Daftar Tabel

Tabel 1.1 Pemberitaan BSN dan SNI 2015 - 2019 9
Tabel 1.2 Potensi dan Permasalahan Biro Hubungan Masyarakat, Kerja Sama, dan Layanan Informasi 23
Tabel 2.1 Tujuan Sekretariat Utama BSN Tahun 2020-2024 29
Tabel 2.2 Tujuan Biro Hubungan Masyarakat, Kerja Sama, Dan Layanan Informasi BSN Tahun 2020-2024 30
Tabel 3.1. Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Biro Hubungan Masyarakat, Kerja Sama, dan Layanan Informasi 2020-2024 31
Tabel 3.2. Rincian Output Kegiatan Biro Hubungan Masyarakat, Kerja Sama, dan Layanan Informasi 2020-2024 32
Tabel 4.1 Target Kinerja Biro Hubungan Masyarakat, Kerja Sama, dan Layanan Informasi Tahun 2020-2024 37

Daftar Gambar

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Biro HKLI 8
Gambar 1.2 Perkembangan followers facebook BSN 10
Gambar 1.3 Perkembangan followers instagram BSN 11
Gambar 1.4 Perkembangan followers Twitter BSN 11
Gambar 1.5 Perkembangan subsribers youtube BSN 11
Gambar 1.6 Grafik jumlah kerja sama dengan perguruan tinggi 15
Gambar 1.7 Grafik jumlah kerja sama dengan kementerian/lembaga 15
Gambar 1.8 Grafik jumlah kerja sama dengan pemerintah daerah 15
Gambar 1.9 Grafik jumlah kerja sama dengan BUMN 16
Gambar 1.10 Grafik jumlah kerja sama dengan Asosiasi 16
Gambar 1.11 Grafik jumlah kerja sama dengan swasta 16
Gambar 1.12 Grafik jumlah kerja sama dengan badan standardisasi 17
Gambar 1.13 Grafik jumlah kerja sama dengan badan pengembang standar 17
Gambar 1.14 Grafik jumlah kerja sama dengan lembaga penilaian kesesuaian luar negeri 18
Gambar 1.15 Grafik jumlah kerja sama dengan badan metrologi 18
Gambar 1.16 Grafik jumlah Penerima Single IIN dan IIN Nasional 19
Gambar 1.17 Grafik jumlah penerima single IIN 19
Gambar 1.18 Grafik jumlah penerima NNS/IIN Nasional 20
Gambar 1.19 Grafik Perkembangan tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan informasi dan perpustakaan 2015 – 2019 20
Gambar 1.20 Peta Sebaran SNI Corner di Indonesia sampai 2019 22
Gambar 2.1 Peta Strategis BSN Tahun 2020-2024 28

BAB I
PENDAHULUAN

Rencana Strategis (Renstra) Biro Hubungan Masyarakat, Kerja Sama, dan Layanan Informasi Tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan, sekaligus berfungsi sebagai *guidance* dalam pengambilan kebijakan jangka menengah pada Biro Hubungan Masyarakat, Kerja Sama, dan Layanan Informasi (Biro HKLI). Selain itu, dokumen Renstra juga menunjukkan potensi dan peran Biro Hubungan Masyarakat, Kerja Sama, dan Layanan Informasi dalam memberikan dukungan pada program dan kinerja Sekretariat Utama dalam kerangka pencapaian visi dan misi BSN periode tahun 2020 sampai dengan 2024. Secara umum, Renstra Biro HKLI Tahun 2020-2024 disusun dengan berpedoman pada Renstra Sekretariat Utama BSN Tahun 2020-2024 yang mengacu pada Renstra BSN Tahun 2020-2024.

Secara khusus penyusunan Renstra Biro HKLI mempertimbangkan isu-isu yang menjadi isu penting dan strategis di lingkungan BSN dan Sekretariat Utama BSN, khususnya isu strategis terkait Pengelolaan Komunikasi publik, Kerjasama kelembagaan serta ayanan informasi termasuk isu terkait perkembangan tren komunikasi publik pada lingkungan yang cepat berubah, viralitas isu negatif, tata kelola kehumasan dan strategi Kerjasama bidang SPK yang efektif, serta pelayanan informasi SPK yang prima untuk mendukung aktifitas SPK yang dinamis .

Bab ini menyajikan kondisi umum Biro HKLI yang menggambarkan pencapaian tujuan-tujuan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Biro HKLI periode sebelumnya (2015-2019). Pada akhir Bab I dipaaparkan secara komprehensif potensi dan permasalahan yang akan dihadapi oleh Biro HKLI 5 (lima) tahun yang akan datang, dimana potensi dan permasalahan yang disusun telah melalui proses analisa dengan mempertimbangkan kelebihan dan kekurangan serta potensi dan tantangan yang berasal dari lingkungan internal maupun lingkungan eksternal Biro HKLI BSN.

Salah satu kondisi yang menjadi perhatian dalam penyusunan Renstra Biro HKLI Tahun 2020-2024 adalah pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19), yakni meluasnya penyebaran infeksi Covid-19 secara global ke seluruh negara, termasuk di Indonesia pada awal tahun 2020. Meluasnya pandemi Covid-19 dengan cepat secara global beserta dengan resiko dan konsekwensinya memaksa terjadinya perubahan strategi pelaksanaan tatanan dalam pemberian layanan informasi.

1.1 Kondisi Umum

Badan Standardisasi Nasional (BSN) merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang pertama kali terbentuk dengan Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1997 tentang Badan Standardisasi Nasional untuk melanjutkan tugas dan fungsi pemerintah di bidang standardisasi yang sebelumnya dilaksanakan oleh Dewan Standardisasi Nasional (DSN). Kemudian dasar hukum pembentukan BSN dipertegas melalui Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen. Keputusan Presiden tersebut mengalami beberapa kali perubahan sampai dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintahan Non Kementerian. Sampai pada akhirnya, BSN memiliki landasan yang lebih kuat terkait eksistensinya dengan landasan hukum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.

Dalam struktur organisasi BSN, Biro HKLI merupakan salah satu unit kerja setingkat eselon II di bawah struktur lingkup Sekretariat Utama BSN. Biro HKLI merupakan unit kerja yang belum lama terbentuk di BSN, yakni baru terbentuk pada akhir tahun 2018 dan mulai efektif tahun 2019.

Sebagai salah satu unit kerja di lingkup Sekretariat Utama BSN, yang mengemban tugas melaksanakan Program Dukungan Manajemen BSN, Biro HKLI mengemban salah satu dari tugas Sekretariat utama dengan fokus pada kegiatan Peningkatan Pelayanan Humas, Kerjasama dan Layanan Informasi

` Sesuai Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 10 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional, tugas pokok Biro Hubungan Masyarakat, Kerja Sama, dan Layanan Informasi adalah untuk melaksanakan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi hubungan masyarakat, kerja sama, dan dokumentasi BSN. Untuk menjalankan tugas pokok tersebut, Biro Hubungan Masyarakat, Kerja Sama, dan Layanan Informasi menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan pembinaan, koordinasi, dan pengelolaan hubungan masyarakat, hubungan antar lembaga, publikasi dan dokumentasi BSN;
2. Penyiapan koordinasi dan pemberian dukungan informasi strategis kepada pimpinan;
3. Penyiapan pembinaan, koordinasi, dan pengelolaan serta dukungan administrasi kerja sama dalam negeri dan luar negeri;

4. Penyiapan pembinaan, koordinasi, dan pengelolaan layanan penerbitan nomor identifikasi;
5. Penyiapan pembinaan, koordinasi, dan pengelolaan layanan informasi dan pengaduan masyarakat; dan
6. Penyiapan pembinaan, koordinasi, dan pengelolaan perpustakaan dan layanan dokumen standar.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Biro Hubungan Masyarakat, Kerja Sama, dan Layanan Informasi mempunyai tata kerja yang didukung oleh :

1. Bagian/Kelompok Substansi Hubungan Masyarakat, dengan tugas melaksanakan penyiapan pembinaan, koordinasi, dan pengelolaan hubungan masyarakat, hubungan antar lembaga, publikasi dan dokumentasi BSN, serta pemberian dukungan informasi strategis kepada pimpinan.
2. Bagian/Kelompok Substansi Kerjasama, dengan tugas melaksanakan penyiapan pembinaan, koordinasi, pengelolaan, dukungan administrasi, evaluasi kerja sama dalam negeri dan luar negeri, dan layanan penerbitan nomor identifikasi.
3. Bagian/Kelompok Substansi Layanan Informasi dan Perpustakaan dengan tugas melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, dan pengelolaan layanan informasi, pengaduan masyarakat, perpustakaan, dan layanan dokumen standar.

   Struktur Organisasi Biro Hubungan Masyarakat, Kerjasama, dan Layanan Informasi dapat dilihat pada gambar 1.1.

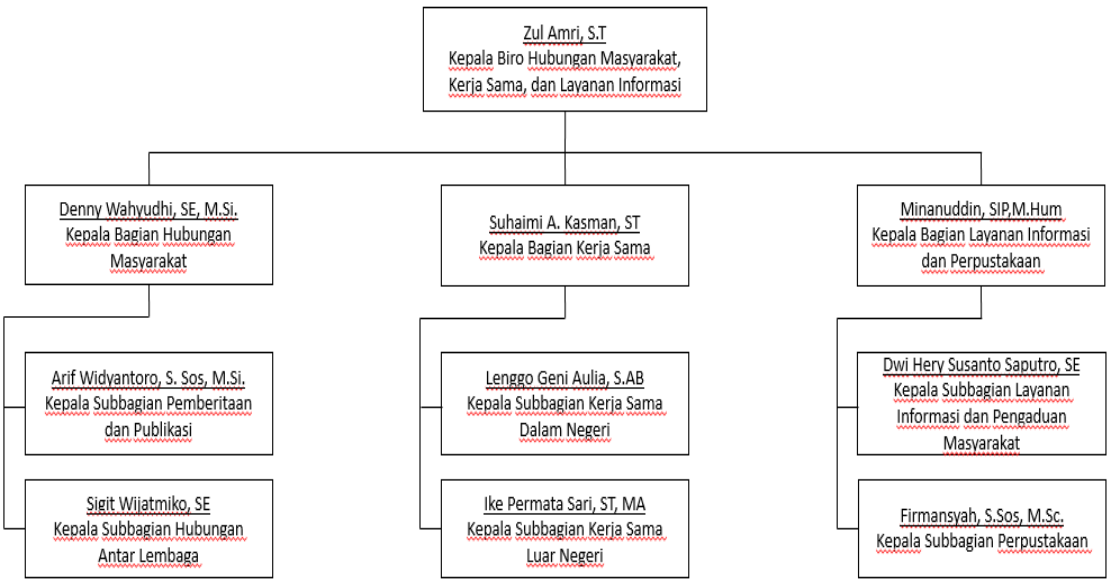

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Biro HKLI

Selama periode Renstra tahun 2015-2019, Biro HKLI telah mencapai berbagai capaian yang merupakan gambaran kinerja pelaksanaan Renstra Biro HKLI periode tersebut. Capaian-capaian tersebut menjabarkan keberhasilan Biro HKLI dalam pelaksanaan strategi, program, dan kegiatan selama tahun 2015-2019. Capaian Biro HKLI selama tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut

Selama 2015 – 2019 aktifitas kehumasan telah berhasil membangun dan meningkatkan citra psotif BSN dengan memaksimalkan pengelolaan media massa yang kemudian didukung oleh kegiatan hubungan antar lembaga baik melalui koordinasi langsung dengan stakeholder BSN, ataupun melalui event seperti pameran. Pemahaman *stakeholder* tentang BSN semakin baik, pemberitaan dan publikasi Humas BSN mencapai (*covarage*) publik BSN yang semakin luas hingga di daerah untuk membantu menciptakan citra positif dan dukungan publik terhadap eksistensi BSN. Metode yang digunakan dalam melaksanakan kegiatan tersebut diantaranya melalui monitoring dan analisis pemberitaan (*media tracking*), kegiatan peliputan, penanganan media dan penciptaan hubungan baik dengan wartawan, membuat publikasi kelembagaan termasuk Majalah SNI Valuasi, pameran yang dilaksanakan didalam maupun di luar kota, koordinasi internal dan hubungan antar lembaga serta kalangan milenial, pengeloaan media sosial dan penciptaan hubungan baik dengan penggiat media sosial, forum kehumasan, dan kegiatan promosi kelembagaan lainnya.

Pengelolaan konten media massa dilakukan secara cermat. Pemberitaan tentang BSN dan Standar Nasional Indonesia/SNI terus mengalami perkembangan seiring isu yang berkaitan dengan SNI, semakin banyak dan beragam. Seperti tergambar dalam tabel berikut ini :

Tabel 1.1
Pemberitaan BSN dan SNI 2015 - 2019

Tahun	Target Pemberitaan BSN & SNI	Jumlah Capaian Pemberitaan BSN & SNI	Persentase
2015	1000	921	92%
2016	1100	4,238	385%
2017	1200	2,065	255%
2018	1200	2,271	189%
2019	1250	2,075	166%
Total	**5750**	**931,649**	

Dari tabel tersebut, terlihat pada tahun 2016 mengalami lonjakan pemberitaan. Hal tersebut dikarenakan penghitungan pemberitaan memaksukkan artikel yang hanya menyebut 1 kata SNI. Oleh karenanya, untuk tahun-tahun berikutnya, penghitungan dilakukan secara lebih selektif, yangmana hanya artikel yang berkonteks BSN atau SNI secara keseluruhan dalam artikel yang masuk dalam penghitungan. Pada tahun 2019 terjadi penurunan pemberitaan dipengaruhi oleh pemotongan anggaran yang cukup signifikan sehingga kemudian berpengaruh pada kegiatan konferensi pers dan penanganan media.

Untuk memperkuat pemberitaan media konvensional, Sejak 2018 Humas BSN juga mengelola media sosial yang meliputi Facebook, Twitter, Instagram, dan BSN Channel (BSN youtube). Hingga saat ini, pengikut (*followers*) di media sosial BSN (*facebook, twitter*, *instagram*, dan *youtube*) meningkat terus dari tahun sebelumnya. Tidak hanya penigkatan *follower*, namun *engagement netizen* juga mengalami peningkatan. Rating FB meningkat meskipun peningkatan tidak berlangsung cepat. *Subscriber BSN Channel* juga bertambah.

Berikut ini Grafik Media Sosial BSN tahun 2018 – 2019

Engagement rate Facebook BSN (rata-rata pertahun):

- 2016-2017 = 2-5%
- 2018-2020 = 6-10%

Gambar 1.2 Perkembangan followers facebook BSN

Engagement rate Instagram BSN (rata-rata pertahun):

- 2016-2017 = 5-10%

Gambar 1.3 Perkembangan followers instagram BSN

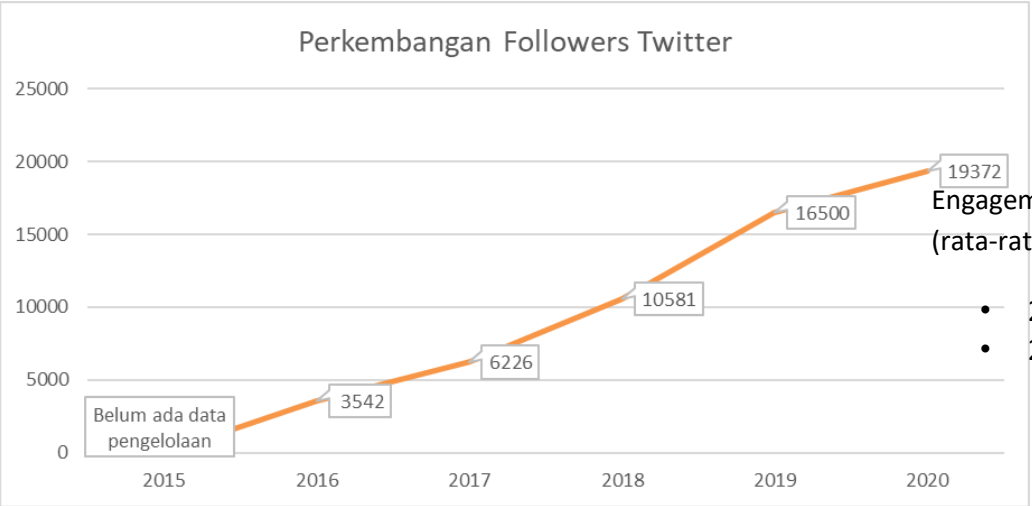

Engagement rate Twitter BSN (rata-rata pertahun):

- 2016-2017 = 0-2%
- 2018-2020 = 2-5%

Gambar 1.4 Perkembangan followers Twitter BSN

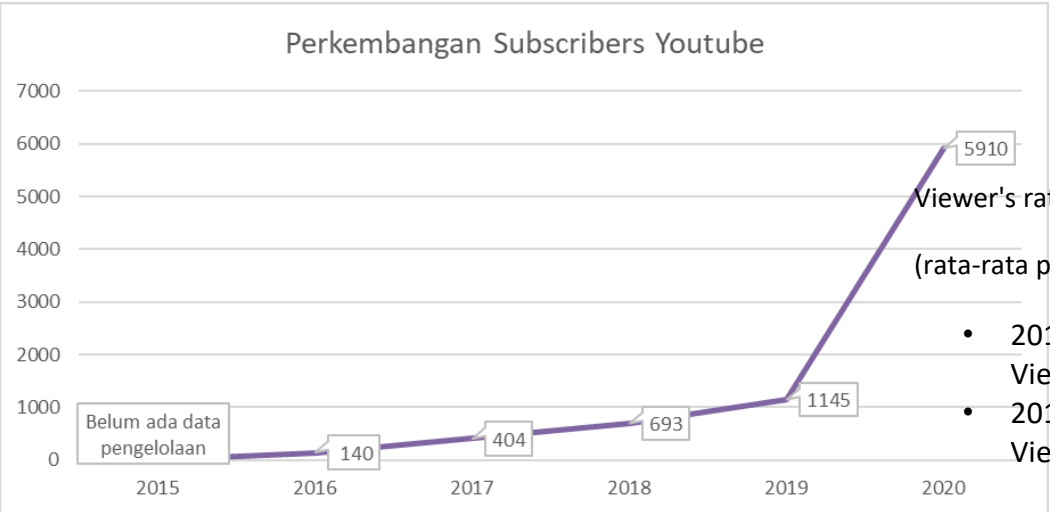

Viewer's rate YouTube BSN

(rata-rata pertahun):

- 2016-2017 = 45-100 Views
- 2018-2020 = 200-2500 Views

Gambar 1.5 Perkembangan subsribers youtube BSN

Untuk memperkuat jaringan komunikasi dan media massa, Humas BSN didukung oleh kegiatan Hubungan Kelembagaan dan Pameran. Bentuk koordinasi antar lembaga antara lain kunjungan industri penerap SNI (*media gathering/SNIZen Meet Up*), kunjungan media (media visit), kunjungan ke K/L/Perguruan Tinggi, serta Rapat Dengan Pendapat (RDP) dengan DPR. Selain itu, Humas BSN juga aktif dalam pertemuan Bakohumas dan IPRAHUMAS untuk dapat menunjukkan eksistensi BSN selain Humas mendapatkan informasi mengenai kebijakan/program kerja K/L lain yang bisa dijadikan benchmark atau analisis kelembagaan. Selain forum Bakohumas, BSN juga masuk dalam Forum Medsos LPNK Ristek.

Berikut ini Kegiatan Hubungan Antar Lembaga Tahun 2015 – 2019

1. Memfasilitasi BSN dalam RDP DPR
2. Melakukan kegiatan SNIZen Meet Up diantaranya di kampus Universitas Nasional, Universitas Atmajaya, Universitas Soegijapranata Semarang, Universitas Negeri Semarang, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, Universitas Muhammadiah Magelang
3. Benchmark Kehumasan ke beberapa humas instansi diantaranya Kementerian Perdagangan, Kementerian PUPR, Kementerian Ristek Dikti, Diskominfo Bali, Universitas Indonesia, Institut Pertanian Bogor, Universitas Padjajaran.

Pameran BSN dilakukan untuk membangun komunikasi 2 arah yang mempertemukan antara BSN dengan pengunjung. Selain itu, melalui pameran terutama pameran Indonesia Quality Expo yang diselenggarakan oleh BSN, Humas BSN dapat memanfaatkan event ini untuk menjaring kerjasama publikasi/pemberitaan serta membuat sarana yang dapat menyatukan tekad bersama BSN dan stakeholder BSN baik ke pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan penerap SNI dengan berbagai skala usaha, asosiasi, dan perguruan tinggi, dalam membangun kesadaran masyakarakat serta menyuarakan akan pentingnya SNI.

Berikut ini pameran BSN tahun 2015 – 2018

1. Pameran diselenggarakan di Jabodetabek diantaranya RITECH EXPO, Pameran Hari Konsumen Nasional, Pameran PP IPTEK, Indonesia Science Expo, IISMEX, NEST, Puspiptek Innovation Festival, Indonesia Product Expo, Food Hall Indonesia
2. Pameran diselenggarakan di luar kota diantaranya Rakernas Ristek, Gemerlap Expo, Invesda Expo, Pameran Perdagangan dan Koperasi, RITECH EXPO, Soropadan Agro Expo,

3. Indonesia Quality Expo/IQE ke-3 (Jakarta), IQE ke-4 (Jakarta), IQE ke-5 (Makassar), IQE ke-6 (Surabaya), IQE ke-7 (Semarang)

Untuk memperkuat informasi tentang BSN dan SNI, selain dilakukan pengelolaan konten kelembagaan dalam website BSN yang meliputi : Berita Kegiatan BSN, Klipping BSN dalam Media, Gallery Foto Kegiatan BSN, Agenda Nasional dan Internasional BSN, Pengumuman Siaran Pers dan Home Slidder, serta beberapa konten seperti Profil BSN. Sejak 2018, Humas juga mengelola Majalah SNI Valuasi yang majalahnya disebarkan ke stakeholder BSN. Selama 2018 – 2019, telah diterbitkan SNI Valuasi sebanyak 8 edisi.

Capaian Substansi Kerja Sama

Dalam memperluas jejaring kerja sama antara BSN dengan para pemangku kepentingan di bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, Badan Standardisasi Nasional telah menjalin kerja sama dengan mitra kerja sama dalam negeri maupun luar negeri. Selama Tahun 2015-2019 BSN telah menjalin 146 hubungan kerja sama dengan mitra kerja sama dalam negeri diantaranya 57 kerja sama dengan Perguruan Tinggi, 34 kerja sama dengan Kementerian/Lembaga, 36 kerja sama dengan Pemerintah Daerah, 19 kerja sama dengan Industri/Asosiasi/Yayasan. Kerja Sama Dalam Negeri difokuskan pada beberapa area diantaranya Pengembangan dan Penerapan SPK, pendidikan, pelatihan dan promosi SPK serta kerja sama di bidang metrologi.

Di skala global, BSN telah menjalin 16 hubungan kerja sama luar negeri dengan 4 (empat) Badan Standar Nasional luar negeri (NSB) diantaranya *Gulf Standardization Organization* (GSO), ESMA-Uni Emirat Arab, *Bureau of India Standards* (BIS) - India, KAN - *The Belarusian State Centre for Accreditation* (BSCA) (Belarus), 6 (enam) kerja sama dengan Organisasi Pengembangan Standar yaitu *Technical Association of the Pulp and Paper Industry* (TAPPI), *National Association of Corrosion Engineers* (NACE), *The International Association of Plumbing and Mechanicals Officials* (IAPMO), *American Society of Mechanical Engineers (*ASME), *American Concrete Institute* (ACI) dan Underwriters Laboratories Inc. (UL), 4 (empat) kerja sama dengan Lembaga Penilaian Kesesuaian Luar Negeri yaitu *Korea Conformity Lanboratories* (KCL), *Korea Testing Certification* (KTC), *Korean Testing Laboratory* (KTL) dan KTL RIPA serta 2 (dua) kerja sama antar Badan Metrologi yaitu Jerman (PTB) Korea (KRISS). Selain menjalin kerja sama dengan mitra kerja sama luar negeri, BSN juga

turut berpartisipasi aktif di berbagai forum SPK internasional seperti ISO, IEC, APEC SCSC, SMIIC dan liason organisasi lainnya dibidang SPK.

Selama Tahun 2015-2019, Partisipasi aktif tersebut ditunjukkan melalui:

- Terpilihnya Sekretaris Utama BSN menjadi anggota ISO Council untuk periode 2018-2020 mewakili Indonesia
- Terpilihnya Direktur Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian BSN sebagai Sekretaris sekaligus Sekretariat *Pacific Area Standards Congress* (PASC) Periode 2020-2022;
- BSN mewakili Indonesia diterima sebagai anggota *Standardization and Metrology Institute for Islamic Countries* (SMIIC) pada sidang SMIIC *General Assembly* yang berlangsung di Mekkah – Saudi Arabia pada bulan November 2019. Keanggotaan Indonesia pada forum SMIIC berlaku secara resmi per 1 Januari 2020.
- Terpilihnya Deputi Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian sebagai anggota ISO DEVCO CAG periode 2020-2022.

Selain menjalin kerja sama dengan mitra kerja sama dalam dan luar negeri, untuk mendukung Implementasi Kerja sama Standardisasi dalam penerapan ISO/IEC 7812, BSN ditunjuk sebagai Layanan Kerja Sama Otoritas Sponsor *(Sponsoring Authority) (IIN) atau Issuer Identification Number (Penerbit Nomor Identifikasi)*. IIN adalah Nomor identifikasi untuk mendukung *interchange* antar lembaga sebagai identifikasi secara khusus bagi lembaga yang menerbitkan kartu, khususnya untuk keperluan transaksi data elektronik. BSN diberikan kewenangan dalam pengelolaan jasa Layanan Kerja Sama Otoritas Sponsor *(Sponsoring Authority) (IIN)* yang bertugas untuk melayani stakeholder/aplikan yang akan menggunakan jasa layanan penerbitan kartu transaksi dan sebagainya. Selama 2015-2019 BSN menerima permohonan aplikasi penerbitan nomor jasa otoritas sponsor/single IIN dari 38 lembaga perbankan maupun non perbankan.

Grafik-grafik berikut ini memperlihatkan capaian jumlah kerjasama dalam negeri dan luar negeri serta capaian layanan otoritas sponsor

1. Capaian Kerja Sama Dalam Negeri di bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian periode 205-2019

Gambar 1.6 Grafik jumlah kerja sama dengan perguruan tinggi

Gambar 1.7 Grafik jumlah kerja sama dengan kementerian/lembaga

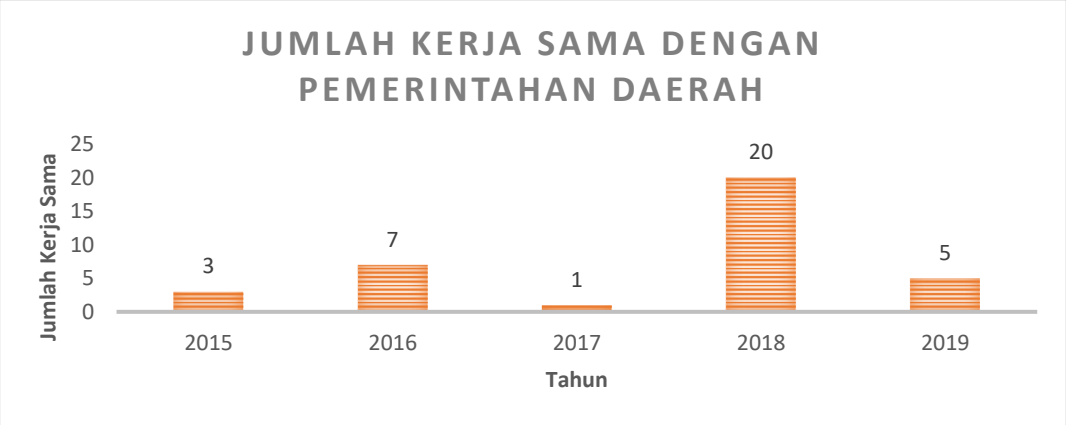

Gambar 1.8 Grafik jumlah kerja sama dengan pemerintah daerah

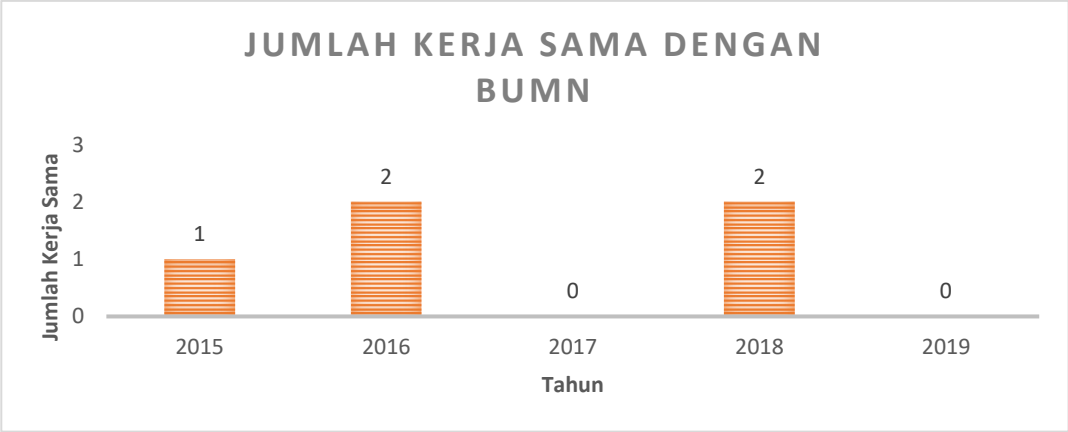

Gambar 1.9 Grafik jumlah kerja sama dengan BUMN

Gambar 1.10 Grafik jumlah kerja sama dengan Asosiasi

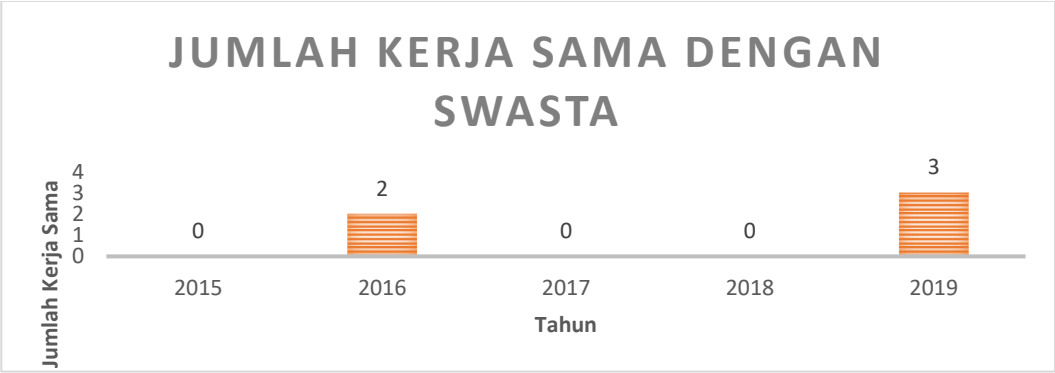

Gambar 1.11 Grafik jumlah kerja sama dengan swasta

2. Capaian Kerja Sama Luar Negeri di bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian periode 205-2019

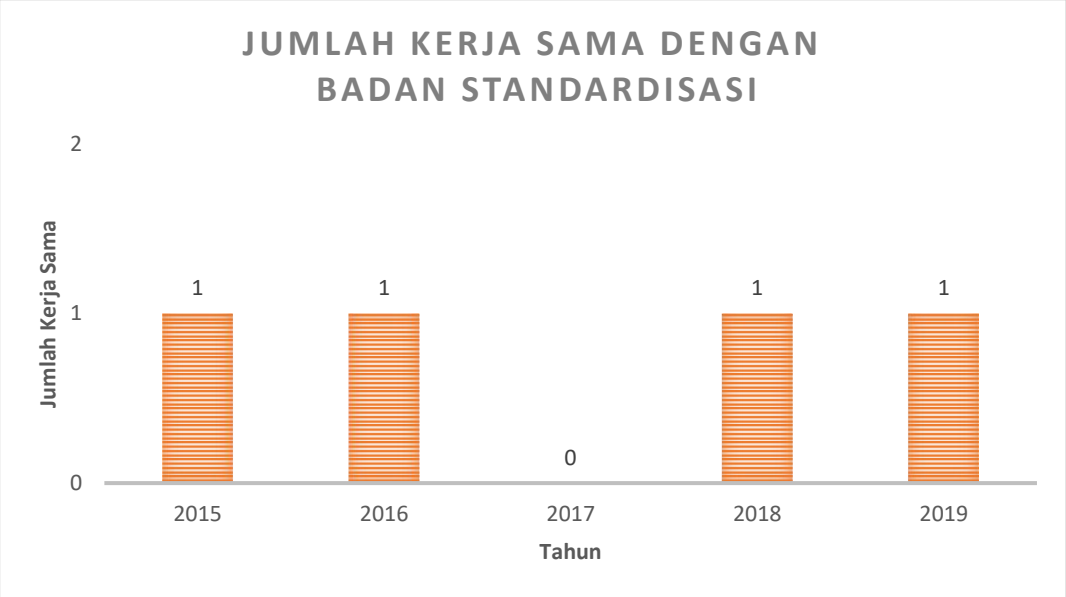

Gambar 1.12 Grafik jumlah kerja sama dengan badan standardisasi

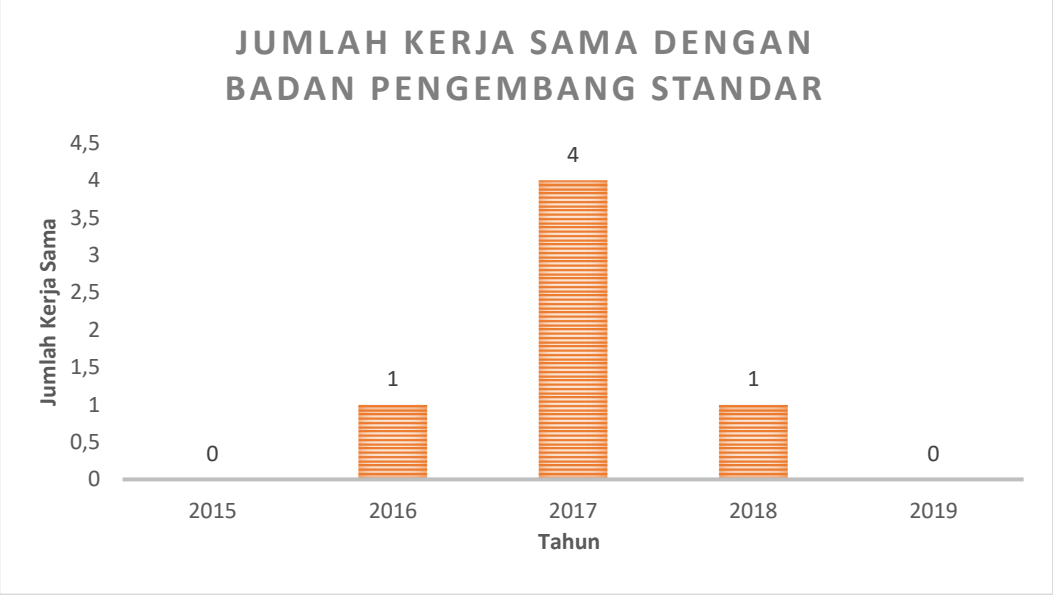

Gambar 1.13 Grafik jumlah kerja sama dengan badan pengembang standar

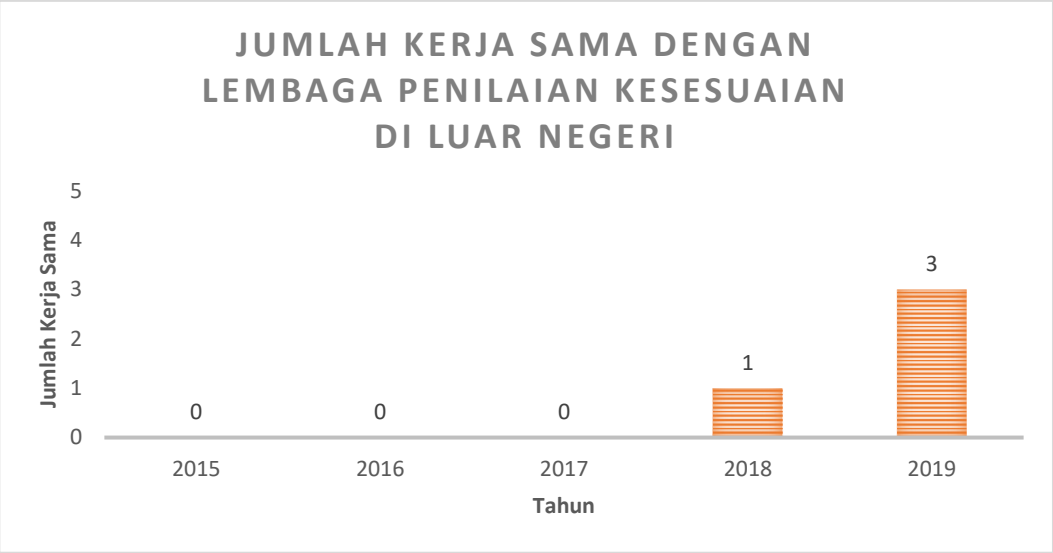

Gambar 1.14 Grafik jumlah kerja sama dengan lembaga penilaian kesesuaian luar negeri

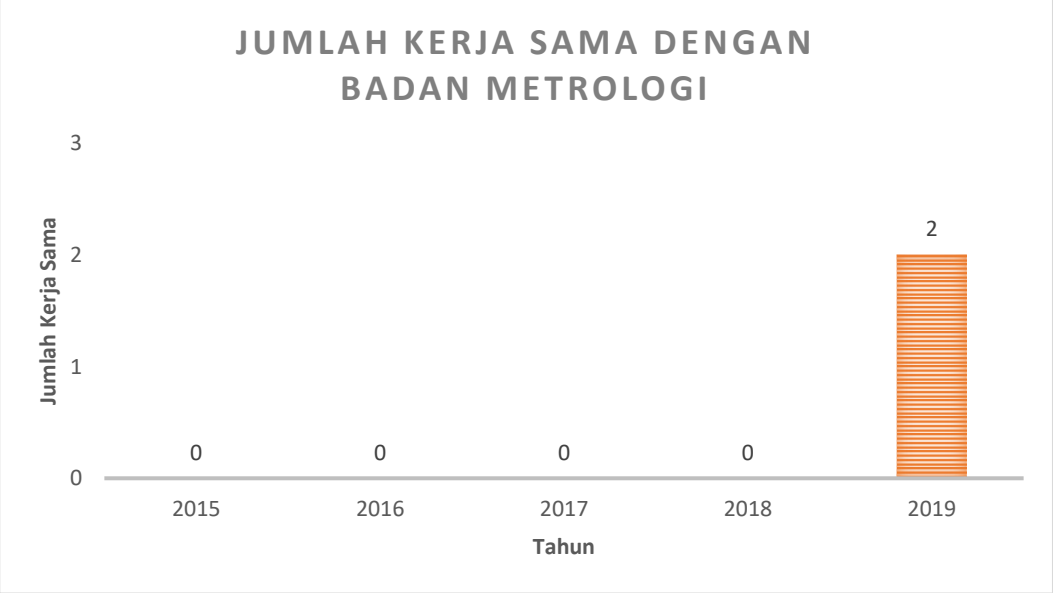

Gambar 1.15 Grafik jumlah kerja sama dengan badan metrologi

3. Capaian Kerja Implementasi Standar 7812 Layanan Jasa Otoritas Sponsor periode 2015-2019

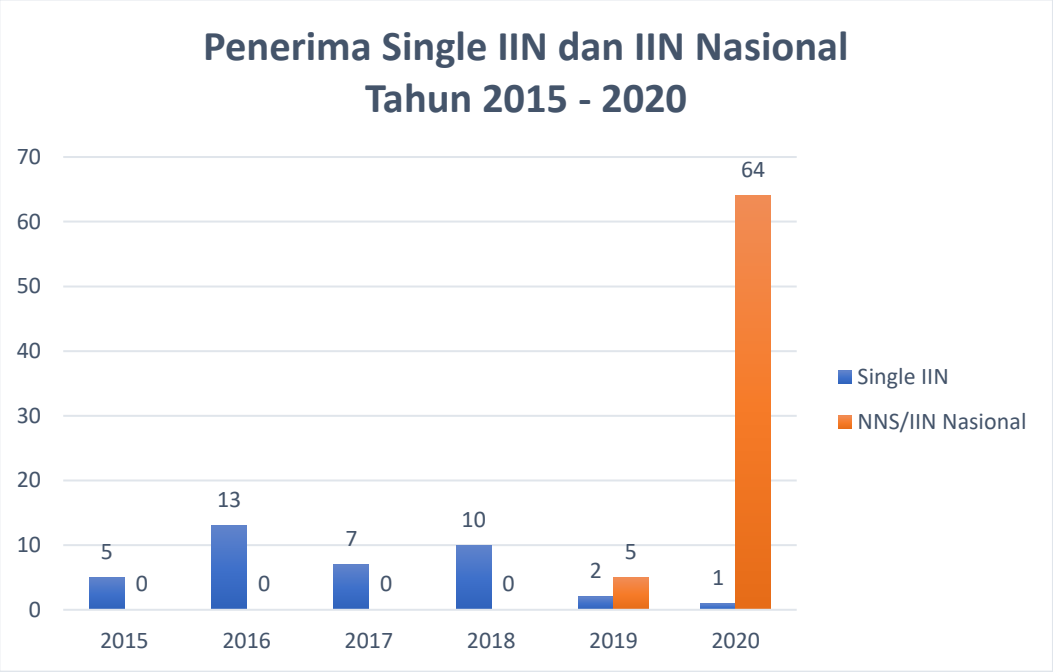

Gambar 1.16 Grafik jumlah Penerima Single IIN dan IIN Nasional

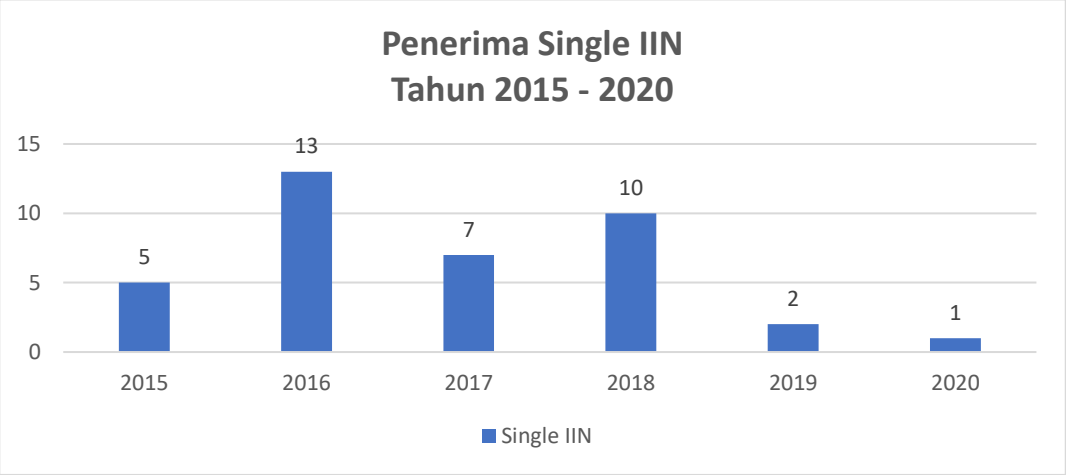

Gambar 1.17 Grafik jumlah penerima single IIN

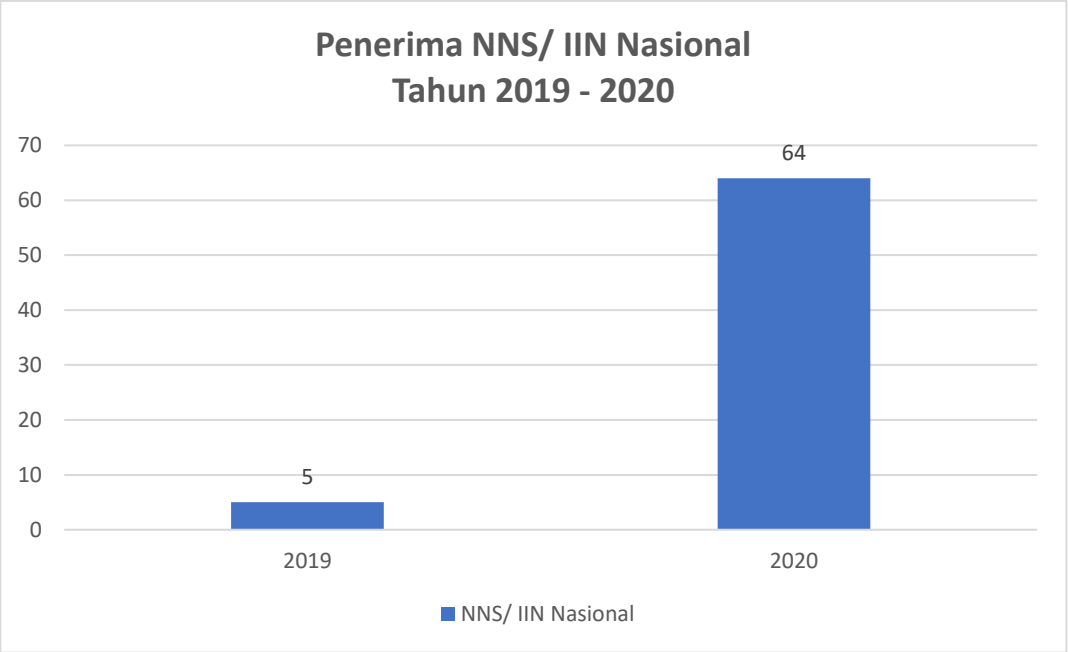

Gambar 1.18 Grafik jumlah penerima NNS/IIN Nasional

Substansi Layanan Informasi dan Perpustakan

Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan layanan informasi standardisasi terus meningkat dalam lima tahun terakhir. Hal ini merupakan hasil dari upaya terus menerus untuk meningkatkan mutu layanan terutama pada aspek kecepatan layanan, kompetensi dan keramahan SDM, serta peningkatan sarana dan prasarana. Nilai tahun 2015 cukup rendah dibandingkan tahun tahun sesudahnya. Hal ini merupakan ekses dari perpindahan kantor BSN dari Gedung Manggalawanabakti di jalan Gatot Subroto kawasan Senayan ke Gedung BPPT 1 di Jalan MH. Thamrin pada tahun 2015 dimana sarana untuk layanan masih kurang memadai. Perkembangan indeks kepuasan dapat dilihat dalam grafik berikut ini.

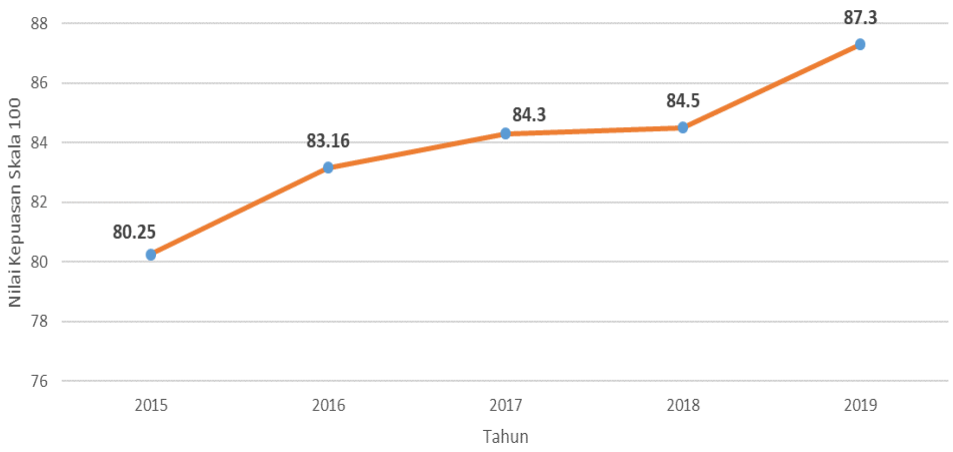

Gambar 1.19 Grafik Perkembangan tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan informasi dan perpustakaan 2015 – 2019

Capaian dari aktifitas Layanan Informasi dan Perpustakaan, Biro HKLI telah melakukan kegiatan-kegiatan diantaranya:

1. Penerapan layanan SNI berbasis elektronik, dimana dokumen SNI dapat diberikan dalam bentuk elektronik yang sebelumnya hanya dapat diberikan dalam format dokumen tercetak. Hal ini telah meningfkatkan kecepatan layanan secara signifikan karena dokumen SNI cukup dikirim melalui e-mail.

2. Penyediaan layanan pemesanan standar secara online dengan aplikasi Pesta Online. Hal ini telah meningkatkan kecepatan layanan secara signifikant pemberian layanan dalam pemesanan dan penjualan standar (SNI dan standar lain seperti ISO, IEC, ASTM)

3. Pembuatan portal perpustakaan Libri stania. Dengan adanya portal ini pengguna dapat memaperoleh informasi dan membaca referensi (repositori institusi) tanpa harus datang secara fisik ke perpustakaan BSN

4. Peningkatan pelayanan publik melalui Penyediaan buku tamu elektronik dan sistem antrian pelanggan, penyediaan fasilitas minuman ringan (air putih, kopi dan teh), peningkatan mutu petugas layanan, perbaruan standar pelayanan, dsb.

5. Pada tahun 2019 Layanan Informasi dan Perpustakaan mewakili Layanan publik BSN mengikuti kompetisi layanan publik yang selenggarakan Kementerian PAN RB, dan mendapat predikat baik dengan nilai 87.

6. Peningkatan Layanan informasi dengan layanan baru berupa e-mail blasting, literasi informasi, dan pengelolaan pengaduan masyarakat melalui aplikasi L4POR yang dikelola secara terpusat oleh Kemeterian PANRB

7. Sampai tahun 2019 BSN telah memiliki 32 outlet SNI Corner yang ditempatkan pada 21 perguruan tinggi dan 11 instansi pemerintah. SNI Corner dirintis sejak tahun 2013. Dalam kurun 2015 – 2019 outlet SNI Corner bertambah 30 outlet. SNI Corner adalah Outlet layanan dan promosi informasi yang menyediakan dokumen SNI dan informasi standardisasi dan penilaian kesesuaian (SPK) beserta sistem aksesnya yang terletak di dalam ruangan perpustakaan atau ruang lainnya yang srategis pada perguruan tinggi atau instansi pemerintah. Pada tahun 2019 mulai dikembangkan portal SNI Corner berbasis web yang memungkinkan

update dan akses konten SNI Corner secara online. Sebaran 32 outlet SNI Corner di seluruh Indonesia dapat dilihat pada peta berikut ini.

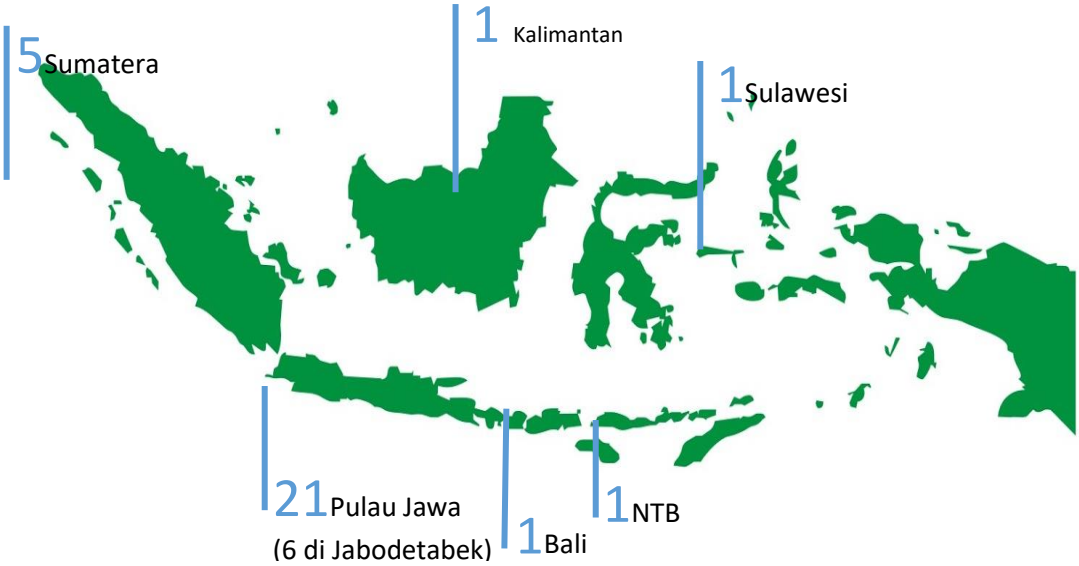

Gambar 1.20 Peta Sebaran SNI Corner di Indonesia sampai 2019

1.2 Potensi dan Permasalahan

Dengan ditetapkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (SPK), BSN diharapkan memberikan kontribusi dalam pemecahan masalah yang dihadapi selama ini. Biro Hubungan Masyarakat, Kerja Sama, dan Layanan Informasi memiliki fungsi sebagai *supporting unit* ke seluruh unit kerja di bidang komunikasi publik, informasi dan kerja sama. Oleh karena itu, kinerja Biro Hubungan Masyarakat, Kerja Sama, dan Layanan Informasi juga akan ikut mempengaruhi kelancaran pelaksanaan tugas unit-unit kerja di lingkungan BSN.

Dalam rangka melaksanakan perannya sebagai *supporting unit* serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada *stakeholders*, Biro HKLI senantiasa dihadapkan pada tantangan baik yang berasal dari internal maupun eksternal, dan dituntut untuk dapat beradaptasi, dinamis dan selalu menghadirkan inovasi dalam mendukung setiap pelaksanaan tugas dibidang SPK.

Sejalan dengan itu, sesuai dengan tugas dan fungsinya Biro Hubungan Masyarakat, Kerja Sama, dan Layanan Informasi telah mengidentifikasi potensi, permasalahan yang dihadapi, dan tindak lanjut yang akan dilakukan dalam mendukung pelaksanaan fungsi BSN sebagaimana dipaparkan dalam tabel berikut.

Tabel 1.2
Potensi dan Permasalahan Biro Hubungan Masyarakat, Kerja Sama, dan Layanan Informasi

NO	POTENSI	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1	Kegiatan strategis BSN seharusnya bisa di *blow up* lebih optimal	Kegiatan Hubungan Masyarakat bersifat *mobile* karena peran Hubungan Masyarakat yang melekat dan mengikuti pergerakan pimpinan tertinggi di BSN dan kemudian peran Hubungan Masyarakat adalah mengkomunikasikan kegiatan strategis pimpinan tertinggi melalui liputan *web*, *press release*/konferensi pers dengan media, publikasi majalah, konten media sosial dan bahan publikasi lainnya.	Anggaran perjalanan yang tersedia dioptimalkan untuk liputan di Jabodetabek. Adapun liputan di luar kota, mengajukan bantuan anggaran ke unit kerja penyelenggara. Jika unit kerja juga menghadapi kendala anggaran, Bagian Hubungan Masyarakat menitipkan foto dan bahan mentah untuk berita *web*, dengan resiko, tidak ada liputan media dan terkadang hasil foto tidak maksimal. Kegiatan dengan Humas K/L

NO	POTENSI	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
		Selain publikasi lembaga, publikasi BSN mengenai SPK juga penting dilakukan di berbagai K/L baik melalui kegiatan *joint production* maupun melalui *event* seperti pameran, mengingat masih banyaknya K/L yang belum memahami tugas pokok dan fungsi BSN dan SNI. Oleh karenanya, bagian Hubungan Masyarakat membutuhkan dukungan pendanaan perjalanan dinas yang memadai untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Apalagi BSN mendapat penambahan 1 struktur organisasi baru yakni Kedeputian Standar Nasional Satuan Ukuran (SNSU) yang akan berpengaruh terhadap beban tanggung jawab publikasi dan *branding* BSN.	dibatasi hanya beberapa K/L, kegiatan hubungan antar lembaga difokuskan pelaksanaan di kampus dan industri penerap SNI.
2	Minat wartawan terhadap BSN dan isu SPK sangat besar	Minat wartawan untuk mempublikasikan BSN dan SNI, cukup tinggi. Banyak isu yang layak untuk diberitakan di media massa. Namun demikian, untuk mengelola wartawan agar mereka merasa menjadi bagian dari BSN, perlu adanya perhatian dari BSN melalui berbagai kegiatan pengelolaan wartawan diantaranya: *Media Gathering*, *Placement,* Lomba Jurnalistik, dan sebagainya. Hal ini juga membutuhkan biaya untuk penyelenggaraannya terutama untuk *placement* berita di media *mainstream*.	Untuk saat ini, Bagian Hubungan Masyarakat pro aktif melakukan wawancara dan pengumpulan data ke kepala unit kerja di BSN yang kemudian disusun *press release* dan disebarkan ke jaringan Grup Jurnalis BSN – SNI dan jaringan media di daerah. Harapannya komunikasi humas dengan wartawan tetap berjalan, meskipun di sisi lain resiko tidak semua wartawan (terutama wartawan media cetak) yang mau menayangkan *press release* Bagian Hubungan Masyarakat.

NO	POTENSI	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
3	Kesadaran pentingnya penerapan Standar baik dilingkup K/L, lembaga pendidikan maupun asosiasi terkait	• Covid 19 yang ditetapkan sebagai pandemic global • Belum ada skala prioritas kerja sama yang akan ditindaklanjuti • Alokasi anggaran yang tersedia • Jangkauan wilayah yang luas bagi daerah yang telah bekerja sama dengan BSN • Sumber Daya Manusia	• Mapping prioritas kerja sama dengan mitra kerja sama dalam/luar negeri • Mapping alokasi anggaran dalam implementasi kerja sama • Koordinasi dengan Kantor Layanan Teknis sebagai tindaklanjut kerja sama • Memperkuat analisis dampak dan resiko dari kerja sama beserta impementasinya • Melaksanakan kerja sama sesuai dengan prosedur yang berlaku
4	Posisi Stategis BSN diforum Internasional dibidang SPK (ISO Council, ISO DEVCO, PASC, SMIIC dlll)	• Alokasi anggaran yang tersedia • Infrastruktur dan dukungan kesekretariatan • SDM • Data dukung	• dukungan anggaran untuk kesekretariatan BSN pada OI di bidang SPK (partisipasi dalam forum SPK) • memanfaatkan Infrastruktur IT melalui zoom meeting dll • memperkuat analisis dampak dan resiko dari kerja sama beserta impementasinya • Alokasi SDM untuk penanganan KS Internasional
5	Koleksi Standar Nasional dan internasional yang relatif lengkap untuk mendukung layanan informasi dan perpustakaan guna memenuhi kebutuhan shareholder dan stakeholders terhadap dokumen standar	Sebagian dokumen SNI tidak ada/hilang, sebagian lain tulisan kurang jelas, dan sebagian belum tersedia e-filenya. Ini terutama terdapat pada sebagian SNI terbitan lama sebelum tahun 2000.	Perlu dilakukan digitalisasi dokumen SNI yang belum tersedia e-file, dan dilakukan re-write untuk dokumen yang kurang jelas tulisannya. Untuk SNI lama yang tidak tersedia dokumennya perlu dilakukan pencarian dan kaji ulanguntuk diabolisi.
6	Adanya kerjasama yang baik dengan Badan Pembuat Standar, instansi pemerintah, dan perguruan tinggi, serta dengan profesional bidang	Kordinasi dan kolaborasi program dengan bagian/unit kerja dalam BSN belum optimal.	Peningkatan kordinasi program dengan didahului peningkatan wawasan kemampuan untuk kordinasi dan kolaborasi program kegiatan.

NO	POTENSI	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
	informasi dan perpustakaan		
7	Tersedianya sarana (termasuk infrastruktur IT) yang memadai untuk mendukung pemberian layanan informasi dan perpustakaan secara cepat, mudah, dan nyaman.	Belum tersedia webstore yang memadai untuk mendukung pelayanan/penjualan standar secara elektronik sehingga kemudahan dan kecepatan layanan belum tercapai secara optimal.	Untuk mencapai tingkat kemudahan dan kecepatan yang optimum dalam pemberian layanan penjualan standar perlu dikembangkan webstore yang memadai, dan sistem i-SNI untuk peminjaman SNI bagi masyarakat pengguna.
8	Terdapat 32 SNI Corner di perguruan tinggi dan instansi pemerintah di berbagai wilayah di Indonesia yang dapat didayagunakan untuk memberi dukungan informasi dan referensi SPK dalam aktifitas standardisasi dan penilaian kesesuaian, serta dalam membangun budqaya standar/budaya mutu	SNI Corner yang ada pada umumnya masih kurang berdaya guna sesuai potensinya karena pengelola SNI Corner setempat kurang memiliki spirit dan pengetahuan SPK serta minimnya dana untuk pemeliharaan dan pengembangan SNI Corner.	Penyelenggaraan SNI Corner perlu mendapat perhatian yang lebih baik yang didukung dengan kebijakan yang lebih jelas. Pengelola SNI Corner perlu ditingkatkan spirit dan kompetensinya di bidang SPK dan anggaran untuk pemeliharaan dan pengembangan 32 yang ada SNI Corner perlu ditingkatkan.
9	Permintaan dan kebutuhan terhadap standar dan informasi SPK cukup tinggi dan potensinya terus meningkat seiring peningkatan kesadaran masyarakat mengenai SPK	Pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap keberadaan dan kegunaan standar dan informasi standardisasi masih kurang, baik itu di kalangan dunia usaha, pemerintahan, maupun diperguruan tinggi. Adanya pandemi Covid 19 dapat menurunkan permintaan standar dan pemenuhannya	Untuk meningkatkan awareness dan pengetahuan stakeholders dari berbagai kalangan terhadap keberadaan informasi SPK dan cara memanfaatkannya, maka kegiatan literasi informasi SPK perlu diperbanyak, diperluas dan dikembangkan secara terencana. Perlu peningkatan promosi dan pemanfaatan layanan penjualan daring

BAB II
VISI, MISI, DAN TUJUAN 2020-2024

Arah pengembangan Biro HKLI BSN dalam selama 5 (lima) tahun ke depan ditentukan berdasarkan hasil analisis terhadap perkembangan lingkungan strategis BSN yang terkait dengan tugas dan fungsi Biro HKLI, baik lingkungan internal maupun eksternal. Selain itu, penentuan arah pengembangan Biro HKLI jjuga perlu diselaraskan dengan Renstra BSN Tahun 2020-2024 dan RPJMN Tahun 2020-2024. Arah pengembangan Biro HKLI BSN direpresentasikan melalui misi, tujuan, dan sasaran strategis Biro HKLI BSN tahun 2020-2024 yang selaras dengan misi, tujuan, dan sasaran strategis Sekretariat Utama BSN tahun 2020-2024 dan RPJMN tahun 2020-2024. Penjabaran visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Biro HKLI BSN tahun 2020-2024 dijabarkan dalam sub-bab berikut ini.

2.1 Visi BSN, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Sekretariat Utama BSN

Visi merupakan tujuan masa depan suatu instansi atau organisasi yang dibuat secara tertulis**.** Berdasarkan arahan Presiden Republik Indonesia, maka Kementerian/Lembaga (K/L) hanya memiliki 1 (satu) visi, yaitu visi Presiden Republik Indonesia 2020-2024 yaitu “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Selaras dengan visi Presiden tersebut, maka visi BSN tahun 2020-2024 adalah:

VISI

“Badan Standardisasi Nasional yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Visi, misi, dan tujuan BSN selanjutnya dijabarkan ke dalam sasaran strategis BSN yang menjadi dasar dalam menentukan standar kinerja BSN 5 (lima) tahun kedepan. Sasaran strategis tersebut dihubungkan keterkaitannya menjadi sebuah peta strategis BSN Tahun 2020-2024. Dengan adanya peta strategis, maka ketertelusuran data dan output dari suatu sasaran strategis dapat dijadikan sebagai input sasaran strategis di tingkat atasnya untuk menuju pencapaian outcome BSN. Dalam penyusunan peta strategis BSN Tahun 2020-2024 menggunakan pendekatan metode *balanced scorecard* (BSC) yang dibagi dalam empat perspektif, yaitu

stakeholder perspective, customer perspective, internal process perspective, dan *learning and growth perspective*. Peta strategis BSN Tahun 2020-2024 dapat digambarkan sebagai berikut

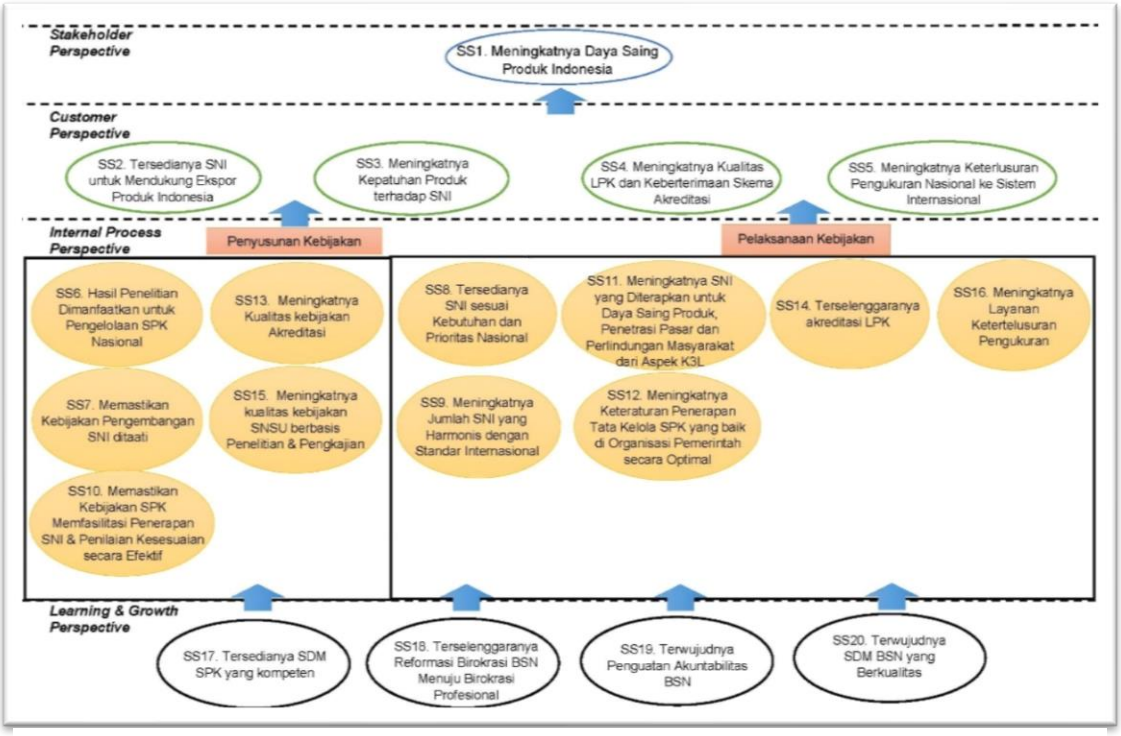

Gambar 2.1 Peta Strategis BSN Tahun 2020-2024

BSN memiliki 20 (dua puluh) sasaran strategis (SS) yang dapat dilihat dalam peta stategis 2020-2024 di atas.

Adapun Visi Sekretariat Utama BSN Tahun 2020-2024, juga selaras dan berada dalam kerangka visi BSN tersebut, adalah **Mewujudkan Tata Kelola dan Birokrasi yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas** dalam mewujudkan Visi Badan Standardisasi Nasional

Sekretariat Utama BSN mendukung keseluruhan misi BSN, secara tidak langsung atas 5 misi pertama dan secara langsung pada misi ke-6 yakni: Menerapkan reformasi birokrasi BSN sesuai *roadmap* reformasi birokrasi nasional, melalui:

1. Meningkatkan pengembangan organisasi dan tata Kelola BSN
2. Meningkatkan manajemen SDM aparatur yang professional
3. Meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan
4. Memfasilitasi layanan sarana-prasarana, administrasi, dan teknis yang cepat, efektif, dan akuntabel
5. Memberikan dukungan layanan perencanaan dan penganggaran
6. Menyediakan informasi publik yang akurat dan aktual.

7. Menjalin Kerjasama dalam dan luar negeri dibidang SPK
8. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada aparatur BSN dan masyarakat

Sedangkan salam rangka mewujudkan visi dan misi Sekretariat Utama BSN, ditetapkan 1 (satu) tujuan Sekretariat Utama BSN Tahun 2020-2024 yang merupakan penjabaran dari Tujuan Utama BSN yaitu:

Tabel 2.1
Tujuan Sekretariat Utama BSN Tahun 2020-2024

Tujuan	Indikator Tujuan
Terwujudnya produk Indonesia terstandardisasi nasional dan berdaya saing global	Indeks Reformasi Birokrasi BSN

Sedangkan Sasaran Srategis Sekretariat Utama BSN ditetapkan sebanyak 3 (tiga) yang merupakan mandat dari Tujuan dan Sasaran Strategis yang ada pada level BSN, dengan Sasaran Strategis yang ingin dicapai dalam tujuan Terselenggaranya Reformasi Birokrasi Menuju Birokrasi Professional adalah:

a. Indeks Reformasi Birokrasi BSN
b. Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
c. Indeks Profesionalitas BSN

2.2. Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Biro Hubungan Masyarakat, Kerja Sama Dan Layanan Informasi

Misi

Misi Biro Hubungan Masyarakat, Kerjasama, dan Layanan Informasi adalah mendukung terhadap misi Sekretariat Utama yang merupakan penjabaran dari misi BSN 2020-2024. Misi Biro HKLI dijabarkan dalam 3 (tiga) misi, adalah sebagai berikut :

1. Menciptakan komunikasi publik yang efektif dan positif antara BSN dengan masyarakat (istilah komunikasi publik ada di Renja 2022
2. Menyediakan informasi standardisasi dan penilaian kesesuaian (SPK) yang akurat dan mutakhir guna mendukung aktifitas SPK .
3. Menjalin Kerjasama dalam dan luar negeri untuk mendukung kegiatan Standardisasi dan penilaian kesesuaian

Tujuan

Dalam kerangka misi Biro Hubungan Masyarakat, Kerjasama, dan Layanan Informasi adalah mendukung terhadap misi Sekretariat Utama, ditetapkan tujuan biro HKL yang sama dengan tujuan Sekretariat Utama

Tabel 2.2
Tujuan Biro Hubungan Masyarakat, Kerja Sama, Dan Layanan Informasi BSN Tahun 2020-2024

Tujuan	Indikator Tujuan
Terwujudnya produk Indonesia terstandardisasi nasional dan berdaya saing global	Indeks Reformasi Birokrasi BSN

Sasaran Strategis :

Sasaran Strategis Biro Hubungan Masyarakat, Kerjasama dan Informasi sejalan dengan sasaran strategis yang sesuai dari sasaran strategis BSN dan sasaran strategis Sekretariat Utama BSN, yaitu Terselenggaranya reformasi birokrasi BSN menuju birokrasi profesional, dengan indikator kinerja berupa Indeks Reformasi Birokrasi BSN.

BAB III
KEGIATAN DAN RINCIAN OUTPUT

3.1 Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) Biro Hubungan Masyarakat, Kerja Sama, dan Layanan Informasi

Sebagai unit Eselon II pada Sekretariat Utama BSN, Biro HKLI menjalankan 1 (satu) Kegiatan dari 3 ((Tiga) Kegiatan Settama, yaitu kegiatan Peningkatan Pelayanan Humas, Kerjasama dan Layanan Informasi. untuk mengukur tingkat keberhasilan pencapaian kegiatan dirumuskan Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3.1.
Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Biro Hubungan Masyarakat, Kerja Sama, dan Layanan Informasi 2020-2024

Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
Peningkatan Pelayanan Hubungan Masyarakat, , Kerja Sama dan Layanan Informasi	Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik BSN	Nilai Keterbukaan Informasi Publik ---------- Indeks Kepuasan Penerima Layanan Informasi Publik
	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik BSN yang Prima	Nilai Peningkatan Kualitas Layanan Publik pada Kriteria Pengungkit ---------- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan public
	Meningkatnya Pengelolaan Dukungan Kerjasama	Persentase calon Partisipan mitra Kerja Sama yang Menjalin Kerjasama
		Persentase Kerjasama yang Ditindaklanjuti
	Terlaksananya Pengelolaan layanan Informasi yang Tepat Waktu, Tersedia dan Update	Persentase layanan Informasi yang Tepat Waktu, Tersedia dan Update

3.2. Rincian Output

Kegiatan Peningkatan Pelayanan Hubungan Masyarakat, Kerja Sama dan Layanan Informasi memiliki sejumlah output dengan rincian output sebagai berikut .

Tabel 3.2.
Rincian Output Kegiatan Biro Hubungan Masyarakat, Kerja Sama, dan Layanan Informasi 2020-2024

KODE	SASARAN/INDIKATOR PROGRAM/OUTPUT/ KEGIATAN/KRO/RO/ KOMPONEN	TARGET SASARAN/OUTPUT PROGRAM				SATUAN
		2021	2022	2023	2024	
4176. 'Peningkatan Pelayanan Hubungan Masyarakat, Kerja Sama dan Layanan Informasi						
SASARAN KEGIATAN						
	Meningkatnya keterbukaan informasi publik BSN					
	Nilai Keterbukaan Informasi Publik					
	Indeks kepuasan penerima layanan Informasi publik					
KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT						
4176.BMA	**Data dan Informasi Publik**					
RINCIAN OUTPUT						
001	Layanan pengelolaan Informasi dan Perpustakaan	1	1	1	1	Layanan
051	Persiapan Pengelolaan informasi dan Perpustakaan	1	1	1	1	Laporan
052	Pelaksanaan Pengelolaan informasi dan Perpustakaan	1	1	1	1	Laporan
053	Pelaporan Pengelolaan informasi dan Perpustakaan	1	1	1	1	Laporan

SASARAN KEGIATAN						
	Meningkatnya kualitas layanan publik BSN yang prima					
	Nilai peningkatan kualitas layanan publik pada kriteria pengungkit					
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik BSN					
KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT						
4176.BMA	**Data dan Informasi Publik**					
RINCIAN OUTPUT						
002	Layanan Informasi Standardisasi	1	1	1	1	Layanan
	Persiapan Peningkatkan Layanan Informasi Standardisasi	1	1	1	1	Laporan
	Pelaksanaan Peningkatkan Layanan Informasi Standardisasi	1	1	1	1	Laporan
	Pelaporan Peningkatkan Layanan Informasi Standardisasi	1	1	1	1	Laporan
SASARAN KEGIATAN						
	Meningkatnya kualitas layanan internal Biro HKLI					
	Indeks kepuasan penerima layanan internal Biro HKLI					
KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT						
4176.EAI	**Layanan Kehumasan dan Protokoler**					
RINCIAN OUTPUT						
001	Layanan Kehumasan	1	1	1	1	Layanan
	051. Perencanaan Layanan Kehumasan	1	1	1	1	Laporan
	052. Pelaksanaan Layanan Kehumasan	1	1	1	1	Laporan
	053. Pelaporan Layanan Kehumasan	1	1	1	1	Laporan
SASARAN KEGIATAN						
	Meningkatnya pengelolaan dukungan kerja sama					
	Persentase calon partisipan mitra yang menjalin kerja sama					
	Persentase kerja sama yang ditindaklanjuti					
KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT						
4176.AEC	**Kerja Sama**					
RINCIAN OUTPUT						

001	Pengelolaan Kerja Sama Dalam Negeri					
	051. Persiapan Kerja Sama Dalam Negeri					
	052. Pelaksanaan Kerja Sama Dalam Negeri					
	053. Monitoring dan Evaluasi Kerja Sama Dalam Negeri					
002	Pengelolaan Kerja Sama Luar Negeri					
	051 Persiapan Kerja Sama LN					
	052 Pelaksanaan Kerja Sama LN					
	053 Monitoring dan Evaluasi Kerja Sama LN					
004	Layanan Kerja Sama Otoritas Sponsor					
	051. Layanan Kerja Sama Otoritas Sponsor					
	052. Pelaksanaan Layanan Kerja Sama Otoritas Sponsor					
	053. Monitoring dan Evaluasi Layanan Kerja Sama Otoritas Sponsor					
KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT						
4176.AEG	**Konferensi dan Event**					
RINCIAN OUTPUT						
001	Sidang APEC SOM I dan SOM II					
	051 Persiapan Sidang APEC SOM I dan SOM II					
	052 Pelaksanaan Sidang APEC SOM I dan SOM II					
	053 Laporan Sidang APEC SOM I dan SOM II					
002	Sidang PASC					
	051 Persiapan Sidang PASC					
	052 Pelaksanaan Sidang PASC					
	053 Laporan Sidang PASC					
003	Sidang ISO					
	051 Persiapan Sidang ISO					
	052 Pelaksanaan					

	Sidang ISO					
	053 Laporan Sidang ISO					
SASARAN KEGIATAN						
	Terlaksananya pengelolaan layanan informasi yang tepat waktu, tersedia, update					
	Persentase layanan informasi yang tepat waktu, tersedia, update					
KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT						
4176.BMA	**Data dan Informasi Publik**					
RINCIAN OUTPUT						
001	Layanan pengelolaan Informasi dan Perpustakaan	1	1	1	1	Layanan
051	Persiapan Pengelolaan informasi dan Perpustakaan	1	1	1	1	Laporan
052	Pelaksanaan Pengelolaan informasi dan Perpustakaan	1	1	1	1	Laporan
053	Pelaporan Pengelolaan informasi dan Perpustakaan	1	1	1	1	Laporan

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

Target kinerja dan kerangka pendanaan merupakan alat yang digunakan sebagai panduan implementasi strategi organisasi sehingga kinerja organisasi dapat terukur. Target kinerja memastikan bahwa setiap sasaran strategis dapat diukur keberhasilannya. Kerangka pendanaan memastikan bahwa strategi dapat dieksekusi sesuai anggaran yang ada. Target kinerja dan kerangka pendanaan disusun dengan mempertimbangkan kemampuan dari organisasi serta kebijakan nasional yang mengatur hal tersebut.

4.1 Target Kinerja

Target kinerja merupakan standar kinerja yang disepakati bersama oleh organisasi untuk dilaksanakan pada periode tertentu. Target kinerja Bito HKLI digambarkan dengan Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) yang menjadi ukuran pencapaian setiap sasaran strategis BSN.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Badan Standardisasi Nasional serta mendukung tercapainya kebijakan dan sasaran strategis Sekretariat Utama BSN, Biro HKLI memiliki 5 (lima) sasaran strategis yang diukur melalui 8 (delapan) IKSS yang merupakan kondisi yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sejak 2020.

Lima Sasaran Strategis dan delapan IKSS ditampilkan dalam tabel berikut

Tabel 4.1

Target Kinerja Biro Hubungan Masyarakat, Kerja Sama, dan Layanan Informasi Tahun 2020-2024

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja program		Satuan	Baseline	Target				
					2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Meningkatnya keterbukaan informasi public BSN	1	Nilai keterbukaan informasi publik pada area perubahan penguatan tata laksana (kriteria pengungkit)	Nilai	1250	75	79	83	87	75
		2	Indeks kepuasan penerima layanan Informasi publik			85,5	86	86,5	87,5	88,5
2	Meningkatnya kualitas layanan publik BSN	3	Nilai peningkatan kualitas layanan publik pada kriteria pengungkit	Nilai	>75%	5,20	5,40	5,60	5,80	8,00
		4	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik BSN	Indeks	85	85,5	86	86,5	87,5	88,5
3	Meningkatnya kepuasan internal unit kerja BSN atas layanan HKLI yang diberikan Biro HKLI	5	Indeks kepuasan internal BSN thd layanan Biro HKLI	Indeks		76,5	77,0	77,5	78	78,5
4	Meningkatnya pengelolaan dukungan kerja sama	6	Persentase calon partisipan mitra kerja sama yang menjalin kerja sama	persen			59	61	63	65
		7	Persentase kerjasama yang ditindaklanjuti	persen			>79	>80	>81	>82
5	Terlaksananya pengelolaan layanan informasi yang tepat waktu, tersedia, update	8	Persentase layanan informasi yang tepat waktu, tersedia, update	persen			82	83	84	85

4.2 Kerangka Pendanaan

Pendanaan kegiatan Biro HKLI disusun berdasarkan kerangka pendanaan BSN khususnya yang dilakukan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang bersumber dari Rupiah Murni (RM) dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Prakiraan kebutuhan anggaran kegiatan Biro HKLI tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Lampiran 1 tentang Matriks Kinerja dan Pendanaan Biro HKLI

BAB V
PENUTUP

Rencana Strategis Biro Hubungan Masyarakat, Kerja Sama dan Layanan Informasi (HKLI) Tahun 2020-2024 merupakan panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Biro HKLI untuk lima tahun ke depan dalam rangka mendukung program dan kegiatan BSN . Dokumen Rencana Strategis Biro HKLI ini ini secara lebih spesifik mengacu pada program dan kegiatan Sekretariat Utama BSN yang didasarkan pada visi, misi, tujuan, sasaran strategis BSN Tahun 2020-2024

Biro HKLI BSN sebagai unit kerja BSN yang bertanggung jawab untuk menyediakan dukungan manajemen berupa layanan Hubungan Masyarakat, Kerjasama, dan Layanan berdasarkan Peraturan Kepala BSN harus mampu memberikan kontribusinya secara efektif dan efisien untuk keberhasilan visi dan misi BSN.

Dengan adanya Renstra ini, kegiatan Peningkatan Layanan Hubungan Masyarakat, Kerja Sama dan Layanan Informasi akan dilaksanankan sesuai dengan rencana dan tahapan yang telah ditetapkan, sehingga dapat diharapkan bisa mencapai sasaran dan target yang telah ditetapkan, dan dapat memberikan dukungan dan kontribusi yang signifikan dalam pencapaian visi, misi, program, dan kegiatan BSN.

LAMPIRAN 1
MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT, KERJA SAMA DAN LAYANAN INFORMASI

Prog/ Keg	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN		Jakarta						**136.183**	**195.445**	**194.481**	**184.335**	**190.944**	
Peningkatan Pelayanan Humas, Kerjasama dan Layanan Informasi		Jakarta						**2.975**	**7.018**	**8.395**	**7.895**	**8.420**	
	Meningkatnya keterbukaan informasi publik BSN												Biro HKLI
	- Nilai Keterbukaan Informasi Publik		-	75	79	83	87						
	- Indeks kepuasan penerima layanan Informasi publik		-	86	86,5	87,5	88,5						
	Meningkatnya kualitas layanan publik BSN yang prima												Biro HKLI
	- Nilai peningkatan kualitas layanan publik pada kriteria pengungkit		-	5,4	5,6	5,8	6						
	- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik BSN		85,5	86	86,5	87,5	88,5						
	Meningkatnya kualitas layanan internal Biro HKLI												Biro HKLI
	- Indeks kepuasan penerima layanan internal Biro HKLI		-	6,72	7,39	8,12	8,94						
	Meningkatnya pengelolaan dukungan kerja sama												Biro HKLI
	- Persentase calon partisipan mitra kerja sama yang menjalin kerja sama		-	59	61	63	65						
	- Persentase kerjasama yang ditindaklanjuti		-	>79	>80	>81	>82						
	Terlaksananya pengelolaan layanan informasi yang tepat waktu, tersedia, update												Biro HKLI
	- Persentase layanan informasi yang tepat waktu, tersedia, update		-	82	83	84	85						

LAMPIRAN II

MATRIKS KERANGKA REGULASI BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT, KERJA SAMA DAN LAYANAN INFORMASI

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
TAHUN 2020					
1.	Peraturan Badan Standardisasi Nasional tentang Tarif Rp. 0,0 untuk PNBP Layanan Informasi Standar	PP No. 40 Tahun 2018 tentang PNBP	HKLI	Kementerian/ LPNK	Tahun 2020
TAHUN 2021					
1.	Sistem Informasi Pengaduan Terpadu SP4N Lapor!	Permenpan 62/2018	HKLI	Kementerian/ LPNK	Thun 2021
2.	Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Pedoman Umum Delegasi Republik Indonesia Bidang Standardisasi Dan Penilaian Kesesuaian		HKLI/ PKU	Kementerian/ LPNK	Tahun 2021
3.	Peraturan Badan Standardisasi Nasional tentang Layanan Otoritas Jasa Sponsor	PP No. 40 Tahun 2018 tentang PNBP	HKLI	Kementerian/ LPNK	Tahun 2021
TAHUN 2022					
1.	Perubahan PP PNBP	PP PNBP BSN, Perpres PNBP, UU No 9/2018	Unit Layanan	Kementerian/LPNK	Tahun 2022
TAHUN 2023					
1.	Perubahan Peraturan Badan Standardisasi Nasional No. 2/2015 tentang Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan BSN	PBSN 10/2018 OTK BSN	INSPEKTORAT dan HKLI	Kementerian/ LPNK	Tahun 2023
TAHUN 2024					
	-	-	-	-	

BADAN
STANDARDISASI
NASIONAL